

TRANSFORMASI RUANG AKIBAT KONFLIK (Studi Kasus: Kawasan Wisata Kuta, Bali)

Agung Wahyudi¹, Imam Buchori², Joesron Alie Sjahbana³

1. Teknik Arsitektur, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Diponegoro

2. Program Doktor Teknik Arsitektur dan Perkotaan, Jl Prof Soedarto SH, Tembalang, Semarang, 50275

**Email:agung_wyd@staff.gunadarma.ac.id*

ABSTRAK

The transformation of space in architecture due to conflicts of interest, has not been studied much, so that architecture is used as a benchmark for understanding quality, marking the ownership or power of a group towards space. With a case study of conflicts of interest in the Kuta Bali tourist area, and by applying the land reconstruction method, it was found a process of changing space and its impact on the people of Kuta in particular and for Bali tourism in general, because Kuta is a major tourist destination. In this study will refine the theory of the description of architectural processes of space change due to conflicts of interest. Findings about inter-disciplinary research methods, bridging architectural science with its supporting sciences (sociology, psychology, anthropology). The role of architecture will support an alternative concept in the process of changing space due to conflicts of interest, as well as spatial planning that experiences dynamic and multi-dimensional changes.

Keywords: Ruang Sakral, Perkembangan dan Perubahan Ruang Sakral.

PENDAHULUAN

Proses transformasi ruang selalu ada dalam ruang yang dihuni oleh masyarakat yang berkelompok-kelompok, dan ditunjang oleh kondisi yang tidak setara –unequal condition, Smith (1990). Hal tersebut, kemudian menciptakan kelompok minoritas dan kelompok mayoritas. Dengan kondisi ini, perubahan ruang ke arah terbentuknya ruang baru karena adanya konflik kepentingan. Adanya derajat intensitas rasa memiliki terhadap ruang (space possessiveness) oleh kelompok tertentu. Sehingga timbul sumber kekhawatiran dan ketegangan karena per-saingan karakter ruang yang berbeda saling tarik menarik. Ketegangan dalam ruang tersebut, harusnya bisa diantisipasi bila salah satu dari karakter yang ada dapat dieliminir, namun hal ini tidak selalu dapat diselesaikan dengan sederhana. Yang terjadi kemudian timbullah konflik. Menurut pengamatan, itu terjadi karena tidak ada kesepakatan antar kelompok, terlebih lagi terjadi pada kawasan yang mempunyai potensi dan dibutuhkan oleh masing-masing pihak.

Studi perkotaan yang fokus kajiannya menggunakan pendekatan sosio-spasial dapat dilacak dari karya Henri Lefebvre (1991), David Harvey (1985, 2001, 2012), dan Manuel Castells (1977). Mereka mengeksplorasi ruang dari perspektif Marxian. Dari perspektif ruang,

adanya fenomena kontestasi, negosiasi, konsensus, dan konflik di perkotaan dapat dipahami sebagai bentuk relasi kuasa dari aktor-aktor penataan ruang yang meliputi pemerintah, masyarakat, dan pasar. Relasi tiga aktor ini memengaruhi praktik tata ruang. Pendekatan sosio-spasial memandang bahwa keterlibatan pemerintah dengan kepentingan serta kemauan politiknya sebagai cara memacu pertumbuhan dan sekaligus sebagai instrumen perubahan kota yang mengacu pada pembangunan global metropolitan.

Perubahan-perubahan tata ruang di perkotaan yang memiliki karakteristik sebagai kota wisata modern dan memengaruhi setiap warga serta kehadiran investor atau pengembang yang melakukan pembangunan gedung, fasilitas umum, ruang publik, dan lainnya merupakan bentuk investasi yang terkait dengan perubahan dan tuntutan ekonomi global. Oleh karena itu,

dengan pendekatan sosio-spasial, perubahan-perubahan tata ruang di perkotaan dapat memberikan pemahaman mengenai sinergi pemerintah lokal (Kawasan wisata Kuta, Bali) dan pemerintah nasional (pusat) dengan kekuatan kapital (nasional dan internasional) dalam mengembangkan kawasan industri, real estate, dan sebagainya.

Studi ini menjelaskan bahwa ruang adalah sebuah area dan alat yang berfungsi melestarikan tatanan ekonomi-politik. Ruang itu memiliki karakteristik interaktif dari investor/kapitalis (pengusaha), negara (pemerintah), dan masyarakat (termasuk lembaga swadaya masyarakat yang memiliki kepedulian di bidang ekologi). Oleh sebab itu, konflik dan kontestasi antar aktor dalam praktik tata ruang tidak bisa dihindari.

Hal ini sejalan dengan gagasan Lefebvre (1974, 1991) yang mengatakan bahwa ruang adalah produk politik dan instrumen bagi perubahan sosial ekonomi sehingga ruang itu tidak netral dan pasif. Ruang sebagai produk politik mengakibatkan praktik tata ruang tidak pernah bebas dari keberpihakan aktor yang membuat regulasi tata ruang. Keberpihakan atau ketidaknetralan aktor-aktor dalam menjalankan kuasanya tercermin dari kebijakan yang dibuat oleh regulator (pemerintah). Praktik penataan ruang meliputi kegiatan produksi dan reproduksi ruang yang di dalamnya terdapat perjuangan dari kelas-kelas untuk mendapatkan dan menguasai ruang itu (Lefebvre 1974, 1991). Lefebvre menegaskan bahwa berbagai perbedaan fenomena perjuangan kelas atas suatu ruang itu terkait dengan suatu daerah, kawasan, wilayah, situs, tanah, dan sebagainya, dan hal ini harus dipahami sebagai bagian dari proses spasialisasi yang sama.

Pada intinya, proses spasialisasi itu merupakan paduan dari tiga unsur. Pertama, praktik spasial yang terkait dengan rutinitas individu untuk penciptaan sistematis zona dan wilayah. Praktik tata ruang tersebut dari waktu ke waktu diwujudkan dalam lingkungan dan lanskap yang tertata. Praktik spasial yang paling signifikan di perkotaan terkait dengan pembangunan sektor properti dan bentukbentuk operasional kapital lainnya. Kedua, adanya representasi ruang, bentuk-bentuk pengetahuan, dan praktik-praktik yang mengatur dan mewakili ruang terutama melalui teknik perencanaan dan keterlibatan negara

(pemerintah). Ketiga, adanya pengalaman kolektif ruang. Hal ini terkait dengan ruang-ruang representasi yang dialami setiap orang. Pada konteks ini pasar membangun sistem untuk penciptaan dan akumulasi keuntungan.

Problematika tata ruang di perkotaan, khususnya kawasan Kuta, dapat dijelaskan dengan menggunakan pendekatan sosio-spasial dari Lefebvre. Pendekatannya menawarkan analisis kritis tentang beroperasinya kapitalisme modern yang kemudian dikembangkan oleh David Harvey. Menurut Harvey (1985), terdapat proses kompleks dari kegiatan penataan ruang kota modern dimana kapitalis tidak akan berhenti dalam kegiatan memproduksi keuntungan atas ruang yang dimiliki dan keberhasilannya membangun ruang yang dapat dikonsumsi oleh individu atau karena kapitalis itu mampu membuat bangunan, seperti rumah, apartemen, hotel dengan sistem sewa maupun beli. Selanjutnya, Harvey mengatakan bahwa pembangunan perkotaan bukan proses monolitik pertumbuhan, tetapi merupakan suatu sirkuit. kedua atas kapital yang terdiri dari berbagai macam pengaturan di mana masing-masing mengatur sendiri faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik maupun kolaborasi termasuk tentang kemungkinan yang akan menentukan tingkat dan kualitas investasi dalam kegiatan pembangunan ruang itu.

Sirkuit kedua atas kapital ini terdiri dari kombinasi institusi keuangan swasta, bank-bank yang dimiliki komunitas dan program pemerintah yang mendukung pembangunan kompleks perumahan (real estate). Pembangunan real estate melibatkan pengembang, pemerintah, dan masyarakat. Keterlibatan pemerintah berupa pemberian ijin pengelolaan kepada investor/pengembang dan pembebasan lahan, pengembang yang melakukan pembangunan fisiknya, dan masyarakat yang tergusur oleh pengembang karena lahannya dikenai proyek pembangunan menjadi sebuah kombinasi problematika yang muncul dalam hal penataan ruang kota.

Sikap pemerintah yang tidak netral atau berpihak kepada kapitalis merupakan suatu kebutuhan dari pemerintah untuk merangkul kapitalis—selain kapitalis juga membutuhkan pemerintah termasuk dukungan dan kemauan politiknya untuk mengoperasikan sirkuit kedua kapitalnya maupun sirkuit pertamanya yaitu berupa pembangunan industri (manufaktur) dan

perdagangan (Harvey 1985, 2001). Kelas kapitalis berusaha terus-menerus untuk menghasilkan keuntungan berupa uang maupun ruang. Kepentingan pemerintah terhadap kapitalis adalah sebagai investasi sekaligus mesin penggerak pertumbuhan pembangunan kota pariwisata. Perkembangan atau keterbelakangan suatu daerah atau kawasan

perkotaan dalam analisis Harvey (1985, 1991) disebabkan oleh ada tidaknya aliran investasi dari kapitalis yang berfungsi memproduksi keuntungan, mendistribusi aliran kapital, dan mengkonsumsi ruang.

Pengembangan sistem perkotaan di bawah kapitalisme merupakan aspek fundamental dari analisis tentang ruang dan kota. Ide dasar studi ini mendukung pernyataan Lefebvre (1991) bahwa kapitalisme dipertahankan dengan cara penaklukan dan integrasi ruang. Ruang telah lama berhenti menjadi lingkungan geografis pasif atau ruang geometris kosong. Ruang menjadi instrumental dan menjadi media dari perkembangan kapitalisme. Artinya, ruang merupakan sebuah sistem yang dipandang sebagai sumber daya langka, homogen, memiliki komoditas kuantitatif dan nilai tukar yang diperdagangkan seperti komoditas lainnya di pasar.

Tulisan ini mencoba menjelaskan keterkaitan erat antara ruang dan politik yang menimbulkan pertanyaan apakah ruang itu adalah instrumen politik dan bagaimana relasi kuasa pemerintah, pengusaha/investor, dan masyarakat dalam mengonstruksi ruang untuk

kepentingannya. Apakah ruang adalah sebuah area dan alat perubahan sosial politik untuk pelestarian suatu tatanan sosial dan ekonomi

(ideologi) tertentu? Studi ini fokus tidak hanya mengkaji transformasi ruang akibat pariwisata melainkan juga politis, terutama politik investor untuk menggali keuntungan dengan embel-embel pelestarian budaya.

METODA PENELITIAN

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif untuk menjelaskan permasalahan dalam kajian ini. Observasi jejak fisik secara langsung dilakukan terhadap ruang-ruang yang sudah beralih fungsi dan mempelajari dokumen tentang transformasi desa adat Kuta menjadi kawasan pariwisata global yang terkenal. Penulis melakukan wawancara mendalam dengan aktor-aktor yang mewakili pemerintah di

bidang perencanaan dan pembangunan kota (Bappeko Bali), arsitek tata ruang, akademisi,

dan praktisi tata ruang serta masyarakat untuk memperoleh gambaran tentang praktik penataan tata ruang.

Data yang dikumpulkan dari studi ini, antara lain: 1) data jumlah penduduk, luas wilayah, luas RTH, taman-taman kota, dan perubahan ruang-ruang yang ada; 2) data tentang isu-isu yang menyebabkan terjadinya kontestasi kepentingan antar aktor dalam penataan dan pemanfaatan ruang; 3) ketentuan perundangan tentang kawasan desa adat; 4) data pengamatan atas kondisi infrastruktur, ruang terbuka hijau serta area-area yang sudah berubah fungsi; 5) data pengamatan langsung atas kondisi pembangunan dan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW sebelumnya. Analisis data kualitatif dilakukan melalui proses verifikasi dari sumber data (informan). Data wawancara dari para informan diinterpretasi sesuai dengan kebutuhan penelitian dengan menggunakan metode interpretatif.

DARI PRODUKSI-REPRODUKSI RUANG KE KONSUMSI RUANG

Ruang sebagai unsur utama untuk memahami bertahannya sistem kapitalisme yang terus dapat bermetamorfosis ke dalam berbagai bentuk. Paradigma ruang yang dibangun Lefebvre menggunakan metode dialektika ruang. Lefebvre (1974, 1991) hendak mengatakan bahwa ada dinamika mendasar dalam produksi dan reproduksi ruang karena dalam dinamika itu ada dialektika berupa gerakan, interkoneksi, interaksi uang, orang, dan komoditas.

Gagasan Lefebvre ini kemudian dieksplorasi kembali oleh David Harvey (1985), sehingga Harvey berhasil membangun penjelasan bahwa dalam proses akumulasi kapital selalu menyertakan produksi ruang dalam proses produksi dan reproduksi. Argumentasi Harvey sudah digagas oleh Castells (1977) yang berpendapat bahwa struktur perkotaan dan konsepsi tentang bentuk-bentuk perkotaan secara sosial dihasilkan dari struktur ekonomi-politik yang lebih besar guna melestarikan kepentingan kelas dominan. Kelas ini memiliki ideologi yang diciptakannya sendiri untuk keberlangsungan kapitalisme industrial. Dalam konteks ini dapat ditafsirkan bahwa dalam struktur perkotaan itu ada suatu ideologi

yang diciptakan dan diperjuangkan untuk kepentingan kapitalisme. Ini yang menyebabkan ruang tidak hanya memiliki aspek ekonomi, di mana semua bagian dapat dipertukarkan dan memiliki nilai tukar, tetapi ruang adalah sebagai instrumen politik untuk homogenisasi semua bagian masyarakat sekaligus sebagai model dan prototipe abadi yang memiliki nilai guna yang menolak generalisasi nilai tukar dalam perekonomian kapitalis.

Ruang itu memiliki nilai guna yang fundamental (yang sama dengan) dengan nilai guna waktu (Lefebvre 1974, 1991). Pada kerangka pemikiran Lefebvre, pemerintah sebagai regulator tidak dapat mengabaikan nilai guna atas suatu ruang. Artinya, pemerintah secara ideal harus menjadi fasilitator dan regulator dalam menjembatani kepentingan masyarakat dan kapitalis. Pemerintah tidak kepada kepentingan kapitalis. Meski sebagian besar tata ruang Kawasan wisata Kuta sudah dikuasai oleh gerombolan kapitalis (pengembang, spekulasi, dan investor). Pada produksi ruang terdapat ketegangan yang terus terjadi secara berulang antara masalah ruang (dalam konteks geografis) dan masalah sosial tentang proses sosial yang terjadi di dalamnya. Ini merupakan kontribusi penting bagi perkembangan analisis ruang antar disiplin dan aplikasinya untuk kajian fenomena-fenomena penataan ruang dan pembangunan ruang yang mengandung aspek kekerasan, konflik, dan persuasi. Harvey (1985) menyatakan bahwa analisis ruang saat ini tidak lepas dari analisis tentang pembangunan, pelestarian, dan perluasan kapitalisme (modern) serta fenomena urbanisasi kapital.

Menurutnya, sejarah geografi dari perkembangan kapitalisme di kota dapat dipahami dari ruang representasional dan representasi ruang. Kedua ruang itu berkaitan dengan praktik sosial ruang. Artinya, representasi ruang tidak hanya mendominasi praktik spasial, tetapi juga ruang representasional. Jika representasi ruang dibuat oleh kelas/kelompok dominan, maka ruang representasional mengalir dari pengalaman hidup seseorang. Representasi ruang dipandang sebagai ruang yang sebenarnya oleh pihak yang berkuasa sehingga akhirnya representasi ruang menumbuhkan kebenaran ruang.

Ruang dapat memainkan beberapa fungsi sosio-ekonomi. Pertama, ruang berfungsi sebagai salah satu kekuatan produksi. Kedua, ruang dapat berupa beragam komoditas (real estate/property) yang dikonsumsi. Ketiga, ruang secara politik memfasilitasi kontrol sistem ekonomi dan politik. Keempat, ruang akan memperkuat reproduksi hubungan produktif. Oleh sebab itu, ruang bukan suatu wadah kosong yang bersifat geometris dan menjadi ruang bagi keberlangsungan kehidupan sosial semata, tetapi ruang adalah produk sosial (Lefebvre 1974, 1991). Aspek keberlanjutan atas ruang itu bersifat menyeluruh (global sustainability) yang dicirikan dengan bersatunya tiga komponen, yaitu: lingkungan, masyarakat, dan ekonomi.

Ini menegaskan bahwa ruang bukan sesuatu atau produk yang dihasilkan dari interaksi sosial saja, melainkan merupakan produk dari serangkaian interaksi politik yang terjadi secara bersamaan, antara kekuatan kapital, pemerintah, dan masyarakat, sehingga ruang benar-benar menjadi bagian dari proses akumulasi dan sirkulasi kapital. Baik Harvey maupun Lefebvre menyadari bahwa ruang yang dikonstruksi menjadi ruang fisik dan material (bangunan, jalan, taman, dan jembatan), ini menyembunyikan kesenjangan dalam distribusi kekuasaan politik, sumber daya sosial, dan infrastruktur perkotaan. Semua ini ditujukan untuk keberlanjutan akumulasi kapital.

Pemerintah sebagai aktor penata ruang itu memiliki kekuasaan yang beroperasi di bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan/pengendalian. Kuasa pemerintah digunakan untuk menata kota yang berkarakteristik metropolitan sebagaimana yang dibayangkan oleh Castells (2000) yang membaca perkembangan perkotaan pada abad ke-21 ini sebagai wilayah metropolitan yang berkembang sebagai aliran kapital. Wilayah metropolitan yang dimaksud Castells itu memiliki ciri-ciri, antara lain: 1) perluasan kota (urban sprawl) yang merusak batas-batas historis dari sebuah kota yang meluas meliputi wilayah-wilayah perdesaan disekitarnya melalui gelombang suburbanisasi; 2) spesialisasi fungsional dari ruang yang menyebabkan semakin intensifnya segregasi sosial seperti perkembangan secara simultan dari homogenitas wilayah-wilayah permukiman mewah, kehidupan bertetangga yang lebih menekan, adanya pembuatan zona

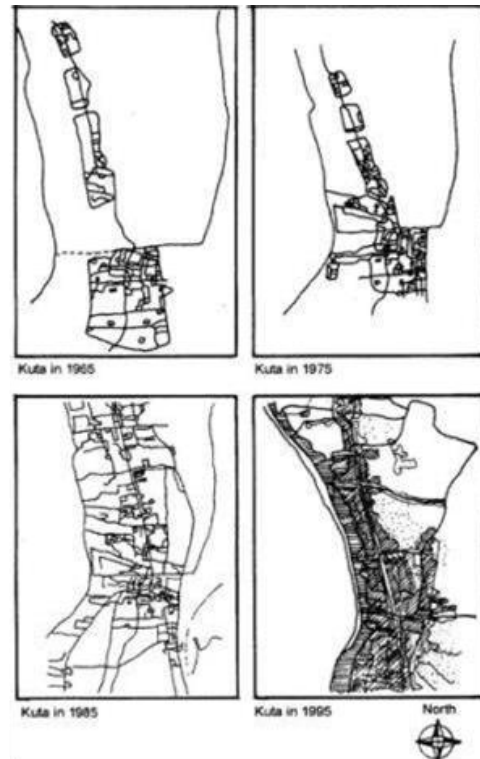
untuk tujuan tunggal, dan lain sebagainya; 3) mobilitas spasial dari orang dan barang yang menjadi aliran darah produksi ekonomi dan reproduksi sosial dari sistem perkotaan; serta 4) lokalisme kosmopolitan yang menjadi kerangka referensi utama bagi politik dan budaya kota, dimana pengaruh global dianggap sesuatu yang penting untuk dapat berkompetisi secara internasional, tetapi harus mengakar dengan budaya lokal agar dapat diterima secara sosial dan politik.

PRAKTIK KERUANGAN KAWASAN WISATA KUTA

Pertumbuhan sektor perekonomian pada suatu kawasan salah satu pemicu timbulnya perubahan ruang, akhirnya menimbulkan permasalahan yang lebih komplit, seperti halnya yang terjadi pada kawasan wisata Kuta. Penguasaan ruang di masyarakat terus berubah seiring dengan perubahan jaman, bisa jadi kondisinya dapat berubah secara radikal, dari ketenangan berpuluh tahun kemudian berubah menjadi konflik. Misanya adanya fungsi ruang yang berbeda yang juga bisa pemicu konflik. Salah satu kekuatan yang membentuk karakter lingkungan suatu kawasan adalah kondisi alam yang ada di sekelilingnya. Menurut Heryanto (2011:50), beberapa ilmuwan telah memperbincangkan hubungan antara pengembangan permukiman manusia dan lingkungan alam (Rapoport, 1969; Shirvani, 1985; Lozano, 1990; Kostof, 1991; Morris, 1994). Karakteristik sifat-sifat dasar lingkungan alam telah mempengaruhi manusia dari masa awal dengan berbagai cara. Kondisi alam sangat mempengaruhi manusia saat proses bermukim, mulai dari memilih lokasi, menggunakan konstruksi yang tepat untuk mendirikan bangunannya yang dianggap sesuai dengan iklim setempat, bahkan merancang bentuk bangunan yang sesuai dengan keadaan sekelilingnya. Unsur fisik lingkungan alam terdiri dari 4 unsur; topografi, iklim, bahan dan teknologi.

Wisata di Kuta dimulai pada tahun 1930an. Di bawah pendudukan kolonial Belanda dalam hal periode ini, Kuta digambarkan sebagai desa sederhana yang terletak di dekat pantai yang merupakan desa nelayan biasa dengan sedikit aktifitas ekonomi atau budaya bagi Bali. Gambar 1 menggambarkan bahwa perubahan paling signifikan terhadap kawasan di Kuta terjadi antara tahun 1980an dan 1990an, saat meluas ke utara menuju Legian dan

Seminyak dan bahkan ke arah timur, menuju perbatasan Denpasar. Selama periode ini, Legian dan desa Seminyak mulai terjadi urbanisasi. Periode ini ditandai dengan konsep baru Kuta sebagai tempat tujuan berbelanja serta wisata, dengan perkembangan awal kawasan ritel Kuta Square dan Kuta Centre di awal tahun 1990. Kedua proyek tersebut berada di lokasi utama berbelanja di Kuta. Seiring dengan Pasar Seni Kuta, ini kunjungan meningkat ke Kuta.



Gambar. 1 Perubahan kepadatan bangunan 1965-1995 kawasan Kuta

Amos Rapoport (1969:74-78), dalam bukunya *House Form and Culture*, menyingkap pengaruh dari topografi sebagai factor yang menentukan pembangunan kawasan permukiman, menurut Rapoport bahwa ada 2 pertimbangan bagi masyarakat untuk memilih tempat tinggalnya, yaitu fisik lingkungan alam setempat, dan sosial budaya. Laut sebagai sumber kehidupan merupakan habitat warga kuta untuk sarana kehidupan.

1. Perubahan Non Fisik Masyarakat

Perubahan sosial budaya masyarakat dapat diketahui melalui sebab-sebab yang melatar belakangi terjadinya perubahan tersebut. Sesu-atu yang dianggap yang dianggap tidak memuaskan lagi dapat dikaji sebagai sebab terjadinya perubahan, disamping itu juga karena

adanya factor baru yang menjadi tuntutan masyarakat sebagai pengganti factor yang lama yang oleh masyarakat dianggap tidak sesuai lagi. Dilain pihak mungkin masyarakat mengadakan perubahan karena terpaksa demi untuk menyesuaikan suatu factor dengan factor lain yang sudah mengalami perubahan terlebih dahulu. Kondisi social budaya masyarakat pada kawasan wisata Kuta, menganggap Laut sebagai sumber kehidupan, keberadaannya tidak terlepas dari intervensi Pemda pada setiap kebijakannya. Sedangkan perubahan aspek ekonomi, dapat disebabkan oleh sumber yang datang dari masyarakat itu sendiri maupun bersumber dari luar masyarakatnya. Aspek ekonomi dalam pembahasan ini menyangkut pola mata pencaharian dari kawasan wisata Kuta, sedangkan factor penyebab perubahan antara lain adalah :

- a. Bertambahnya penduduk di kawasan wisata Kuta berpengaruh besar terhadap usaha pemenuhan kebutuhan keluarga maupun usaha dalam penyediaan lapangan kerja
- b. Penemuan baru dalam aspek ekonomi membawa pengaruh perubahan ekonomi masyarakat dalam hal ini adalah berkembangnya pengadaan fasilitas untuk wisatawan
- c. Perubahan yang terjadi tidak saja dari dalam masyarakat itu sendiri tetapi juga dari luar dan juga dikarenakan adanya intervensi pemerintah.

2. Perubahan Fisik Tata Ruang

Pariwisata sebagai inti kegiatan pembangunan dapat mempengaruhi makna dan nilai warga mengasosiasikan dengan tempat tersebut, terutama melalui bisnis yang baik dan buruk praktik (King, Dwyer & Prideaux, 2006). Secara khusus, saat pariwisata dipraktekkan di Indonesia tidak adanya perencanaan, seperti di Kuta, hasil yang tidak diinginkan mungkin terjadi dialami oleh penduduk setempat. Sehubungan dengan rutinitas orang-orang yang tinggal di Kuta, Budaya tradisional dan wisata, disandingkan: gamelan, kidung lagu untuk ritual keagamaan di Bali teriak di sekitar pura desa, bersaing dengan musik live yang nyaring atau akustik gitar dari pub dan kafe di sekitarnya.

Dalam beberapa keadaan, wisatawan memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap proses perencanaan daripada masyarakat sendiri (Hall & Jenkins, 1995), sehingga tingkat keterlibatan masyarakat dapat dijelaskan sebagai

bentuk angin lalu saja, di mana keputusan atau arahan keputusan sudah ada telah ditentukan oleh industri atau pemerintah. Masyarakat jarang mendapat kesempatan untuk memiliki tanggapan dalam menanggapi masalah yang mempengaruhi kualitas hidup mereka. Sebagai kawasan yang penuh dengan fasilitas wisata, ketidaknyamanan substansial baik pada siang dan malam hari dirasakan masyarakat lokal di Kuta. Operasi pub, bar dan klub malam di Kuta tak dapat disangkal menciptakan ketegangan bagi mereka yang tinggal di kawasan tersebut (Gambar 2).



Gambar 2. Night Club di Kawasan Legian

Kemarahan warga Kuta terhadap polusi suara yang ditimbulkan oleh klub malam yang ada di sebuah kompleks hiburan di Legian Kuta meminta agar warga desa buka bisnis kehidupan malam mereka sampai pukul 1 pagi. Pemerintah daerah telah menyetujui pembukaan sampai jam 2 pagi setiap malam tapi bisnis tetap buka sampai pukul 3 pagi karena persaingan antar klub malam di tempat lain di Kuta dan sekitarnya, dengan asumsi bahwa jam operasional yang lebih lama merupakan layanan yang lebih baik bagi pelanggan.

3. Hilangnya Identitas Bali di Kuta

Sebagai hasil dari perkembangan kontemporer, Kuta telah menjadi tempat dengan banyak bangunan desain post-modern. Terlihat jelas bahwa lanskap pariwisata di Kuta juga telah berubah dari gaya Bali 'lama' yang populer di hotel dan resort di Bali selama tahun 1980an dan 90an, ke 'tampilan modern, karena tuntutan pasar dan era telah berubah. Kondisi ini mengarah pada isu identitas, dimana Bali mempertahankan gagasan 'pariwisata budaya'. Jelas bahwa pariwisata dengan globalisasi dan efek post-modernisme telah berperan dalam

menciptakan kekompakan (Relph, 1956), menghasilkan lingkungan binaan yang mengesampingkan nilai-nilai lokal (Smith, 2005). Penelitian saat ini mengungkapkan tidak adanya elemen arsitektur Bali di bangunan fasilitas wisata baru-baru ini, termasuk hotel yang dibangun dengan konstruksi modern yang tidak mengadopsi desain budaya Bali. Praktek ini membingungkan sistem budaya setempat, terutama berkenaan dengan bagaimana penduduk setempat melihatnya diri mereka dalam kaitannya dengan lingkungan. Renovasi baru-baru ini ke sejumlah tua hotel di Kuta memiliki desain baru yang benar-benar non-Bali (Gambar 3 dan 4).



Gambar 3. Hotel Sahid Desain Lama direnovasi



Gambar 4. Hotel Sahid Desain baru

Pengembang sengaja mengabaikan arsitektur Bali dalam banyak aspek bangunan. Identitas komunal, untuk menggambarkan bagaimana masyarakat melihat arsitektur Bali di Indonesia kaitannya dengan lanskap budaya di Kuta. Terlihat pada gambar 5, yang tidak mencerminkan identitas arsitektur Bali sama sekali



Gambar 5. Desain mirip gelombang dari Pusat Perbelanjaan Kuta Beachside

Domain isu-isu yang berkaitan dengan etnis di sekitar tempat telah menjadi masalah serius sehubungan dengan tradisi dan perkembangan sosio-kultural di zaman modern. Dengan demikian, Identitas etnik memainkan peran penting dalam pengembangan keterikatan tempat (Johnson, 1998). Ikatan emosional ke suatu tempat mencerminkan nilai dan sejarah kelompok budaya, dan tempat harus merangkum sifat-sifat tersebut (Low et al., 2002).

KONFLIK DALAM PRAKTIK KERUANGAN

Keterikatan yang kuat terhadap suatu tempat / place attachment terindikasi oleh kebiasaan protektif masyarakat setempat dan respon mereka terhadap bidang sosial dan lingkungan (Jorgensen & Stedman, 2001; Kudryavtsev, Stedman & Krasny, 2011; Stedman, 2003). Beberapa anggota dari masyarakat Kuta dalam responnya pada isu perkembangan konflik terkini pun telah menjelaskan opini lokal mereka terkait dengan masa depan Kuta. Masyarakat lokal juga melakukan evaluasi dampak positif dan negatif dari perkembangan wisatawan di kawasannya dan kesejahteraannya. Dalam kasus ini, Kuta tidak hanya bersifat ekologis, namun juga dalam hal budaya dan sosial memberikan arti sebagai simbol suatu tempat.

Pertama: Hukum, Keamanan dan Pemerintahan Kehidupan Masyarakat. Gambaran Kuta sebagai tempat wisata yang aman telah dihancurkan oleh banyaknya sejumlah masalah kejahatan (sebagian besar melibatkan non-penduduk setempat), seperti kecurangan oleh penukaran uang yang tidak sah, pencurian mesin ATM, copet, penipuan, dan pelanggaran lainnya

Kedua: Masalah perumahan dan imigrasi.

Berdasarkan isu-isu terkait Migran yang tidak terdaftar: penegakan hukum mengenai bagaimana memperlakukan pelanggar aturan seperti itu lemah dan ada ketidakkonsistenan dalam mengeluarkan sanksi. Oleh karena itu, membutuhkan kesadaran dan perhatian dari penduduk setempat mengenai masalah ini.

Ketiga: Sistem manajemen lalu lintas. Masalah yang termasuk dalam pelanggaran tanda-tanda jalan oleh pengendara mobil dan pengendara motor, lahan parkir yang kurang memadai, lahan parkir pada area pejalan kaki, lalu lintas tidak teratur oleh taksi dan minibus, serta kendaraan yang ditinggalkan.

Keempat: Masyarakat dan ekonomi. Ada penurunan yang tajam dalam perekonomian lokal karena persaingan yang ketat antara pemilik bisnis lokal dan non-lokal. Hal ini dianggap bahwa masyarakat tidak kompeten dalam mengelola bisnis mereka; terlalu sibuk dengan ritual-ritual adat dan aktivitas; pasif dalam mempromosikan bisnis kecil dan memiliki modal keuangan terbatas

Kelima: Pembangunan infrastruktur. Jelas terlihat bahwa jalan-jalan umum telah rusak melalui tingginya tingkat penggunaan. Area pejalan kaki, jalur kecil dan drainase bawah tanah yang tidak lagi dalam kondisi baik. Seperti di banyak tempat lainnya di Bali, penempatan iklan mengganggu dan membuat penampilan berantakan di kawasan Kuta.

Keenam: Pendidikan dan Sumber Daya Manusia. Tidak adanya lembaga di Kuta untuk mendokumentasikan sejarah desa dan mempertahankan arsip.

Ketujuh: Kesehatan dan lingkungan. Kuta merupakan daerah endemik demam berdarah, dan membutuhkan sosialisasi dan koordinasi sehubungan dengan masalah ini. Pembuangan limbah adalah masalah jangka panjang (Lihat gambar 6) dan bau busuk dari saluran air tidak hanya berbahaya bagi lingkungan tetapi juga mengganggu kawasan Kuta sebagai tujuan wisata.



Gambar 6. Pembuangan Sampah di Tepi Jalan

Kedelapan: Mengendalikan kegiatan pariwisata. Salah satu alasan rendahnya tingkat kerja pariwisata para pemuda kawasan Kuta adalah kurangnya minat dalam belajar bahasa asing, sebuah syarat yang mutlak untuk berpartisipasi dalam sektor ini. Pub, Restoran, Bar karaoke dan diskotik di Kuta perlu dikendalikan, karena jumlah mereka tumbuh bersama dengan masalah-masalah yang mereka timbulkan.

Kesembilan: Desa Pemerintahan. Masih ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan dalam administrasi Desa Kuta. Pertama, batas-batas desa Kuta tidak akurat. Kedua, kurangnya koordinasi dan komunikasi antara penduduk desa, dan legitimasi dari proses pengambilan keputusan yang penting tidak jelas. Selain itu, peran dan partisipasi anggota senior di desa tidak memungkinkan mereka untuk berbagi ide-ide dan pengalaman mereka. Konsep pembangunan desa, program, rencana, aktualisasi dan kontrol tidak jelas bagi orang-orang. Masyarakat setempat bingung dengan ketidakharmisan antara Koordinator desa (Kelurahan dan LPM).

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan kajian transformasi ruang pada kawasan wisata Kuta akibat konflik, maka dapat disimpulkan bahwa Praktik penataan yang ada di Kawasan wisata Kuta memperlihatkan dinamika ekonomi-politik. Aktor yang mewakili pemerintah, investor, dan masyarakat memberi andil pada inkonsistensi implementasi penataan ruang. Pemkot Bali merupakan representasi dari sistem kapitalis mengatur dan merasionalisasi ruang untuk produksi dan reproduksi ruang sosial ekonomi. Kondisi itu menguatkan tesis Lefebvre

bahwa dalam suatu ruang terdapat aspek politik. Ruang di Kawasan wisata Kuta sebagai produk politik dan instrumen yang memungkinkan kawasan wisata Kuta dapat berkembang. Dari sini kemudian muncul ruang dominan yang sebagiannya dimiliki oleh kelas dominan (pengembang/investor/kapitalis) dan sebagian lainnya dimiliki oleh masyarakat.

Studi ini juga menguatkan argumentasi Harvey bahwa konfigurasi penguasaan ruang di Kawasan wisata Kuta mengikuti aliran sirkuit kapital yang ada (primer, sekunder, dan tersier). Sirkuit-sirkuit ini terlihat dari kepenguasaan kelas kapitalis/investor, baik dalam ranah produksi dan konsumsi langsung, ranah pembentukan kapital dan konsumsi tetap serta ranah konsumsi. Sirkuit kapital mengakibatkan proporsi penguasaan yang tidak sama antara ketiga aktor dalam praktik tata ruang. Selain itu, Pemkot Bali juga menjamin terciptanya kerangka kelembagaan yang mendukung keberadaan kekuatan kapitalis yang terus menerus mengakumulasi kapital melalui kebijakan-kebijakan tata ruang yang diputuskan melalui proses politik.

Pada setiap interaksinya ketiga aktor itu selalu melewati serangkaian urban process dan proses politik. Interaksi itu menentukan bentuk penyelenggaraan praktik tata ruang yang mengarah pada relasi konfliktual atau sekadar kontestasi. Pada konteks ini, kontestasi dan konflik sebagai suatu kontinuitas dialektis dalam kerangka produksi, reproduksi, dan konsumsi ruang yang dapat berfungsi menguatkan tatanan pembangunan kota berkelanjutan. Artinya, praktik penataan ruang seyogyanya didekatkan pada tataran idealnya yaitu diadakan, diciptakan, dibentuk, direstrukturisasi, dirancang untuk melangsungkan kegiatan-kegiatan seluruh penghuninya.

Daftar Pustaka

Clark, David (1996) *Urban World/Global City*. London: Routledge

Gottdiener, M. (1985) *The Social Production of Urban Space. 2nd edition*. Austin: University of Texas Press.

Harvey, David (1985) *The Urbanization of Capital: Studies in the History and Theory of Capitalist Urbanization*. Oxford UK: Blackwell

----- (2001) *Spaces of Capital: Towards a Critical Geography*. Edinburgh: Edinburgh University Press.

----- (2012) *Rebel Cities: From the Right to the City to the Urban Revolution*. London: Verso

Lefebvre, Henri (1991) *The Production of Space*. translate by Donald

Nicholson-Smith. Cambridge MA: Blackwell.

Soegijoko, Budhy Tjahjati S (2011) “*Smart Growth*” dalam *Pengembangan Perkotaan*. Edisi Januari-Februari Buletin Tata Ruang.

Soetomo, Sugiono (2013) *Urbanisasi dan Morfologi (ed 2)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Soja, Edward W (1989) *Postmodern Geographies: The Reassertion of Space in Critical Social Theory*. London and New York: Verso.

Smith David M (1990) *Introduction: The Sharing and Dividing of Geographical Space dalam Shared Space*. Devided Space: Eds: Chisholm, Michael and Smith, David M, Unwin Hyman Ltd.